CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora
Volume 1, Issue 4, 2023
E-ISSN: 2985-9174
https://doi.org/10.70193/cendekia.v1i4.45

Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Dana Gampong (Studi di Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)

Magfiratul Fitriah[1], Muhammad Fazil[2]*, Dwi Fitri[2], Bobby Rahman[2]*
[1] *Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia*
[2] *Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia*
Email: magfiratul160240003@mhs.unimal.ac.id, muhammad.fazil@unimal.ac.id, dwi.fitri@unimal.ac.d, bobby.rahman@unimal.ac.id,

Citation: Magfiratul, F. Muhammad, F. Dwi, R. Bobby, "Komunikasi Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Dana Gampong (Studi di Gampong Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara), Sosial & Humaniora, 1, no. 4 (2023): 372-378.

Received: 12 Agustus 2023
Revised: 20 September 2023
Accepted: 27 September 2023
Published: 09 Oktober 2023

Corresponding Author: muhammad.fazil@unimal.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh komunikasi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah gampong belum maksimal dan belum transparan dalam mengomunikasikan tentang perencanaan dan pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja gampong sehingga ini menghambat tercapainya tujuan komunikasi pembangunan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan beberapa langkah teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan Pemerintah Gampong Alue Leuhob dan masyarakat gampong dilakukan secara langsung dan dengan menggunakan bantuan media. Komunikasi secara langsung yang dilakukan meliputi musyawarah dusun, musyawarah gampong dan rapat-rapat. Sedangkan media yang dipakai oleh pemerintah gampong antara lain baliho/spanduk dan batu prasasti. Selain itu hambatan yang dihadapi pemerintah gampong berupa kurangnya SDM yang terampil untuk mengelola sarana komunikasi website gampong, kurangnya ketertarikan mengenai pengelolaan dana gampong terkait hal-hal yang kurang memberikan bermanfaat bagi sebagian warga, membuat mereka kurang tertarik untuk mengawasi jalannya pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Komunikasi; Pemerintah; Pengelolaan; Dana; Gampong Alue Leuhob

Abstract: *This research is motivated by development communication carried out by the village government that has not been maximized and has not been transparent in communicating about the planning and management of village revenue and expenditure budget funds so that this hinders the achievement of effective development communication goals. This research uses a descriptive qualitative approach with several steps of data collection techniques observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the communication between the Alue Leuhob Village Government and the village community is carried out directly and by using media assistance. Direct communication*

includes hamlet meetings, village meetings and meetings. Meanwhile, the media used by the village government include billboards/banners, signs, and stone inscriptions. In addition, the obstacles faced by the village government are in the form of a lack of skilled human resources to manage village website communication facilities, a lack of interest in the management of village funds related to things that are less beneficial to some residents, making them less interested in overseeing the management of village funds.

Keywords: *Communication; Government; Management; Fund; Gampong Alue Leuhob*

1. PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan penting untuk bertahan hidup diluar sandang, pangan dan papan.[1] Komunikasi memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aktivitas organisasi. Komunikasi digunakan pelaku organisasi sebagai media untuk menyalurkan berbagi informasi serta sebagai penghubung antar individu dalam sebuah organisasi sehingga dapat membentuk jaringan informasi dalam organisasi yang proses penyebaran dan pertukaran informasinya dapat terjadi didalam ataupun diluar lingkaran organisasi seperti misalnya transparansi mengenai segala penunjang organisasi yang dijabarkan dengan menggunakan media komunikasi.[2]

Komunikasi dan organisasi merupakan dua elemen yang saling berhubungan erat dalam proses berorganisasi.[3] Dengan komunikasi kegiatan organisasi menjadi lebih berinstrumen dalam membangun kesepemahaman makna maupun mencapai tujuan individu dan organisasi, merespon dan mengimplementasikan perubahan organisasi, serta mengkoordinasikan aktivitas berorganisasi.[4] Komunikasi organisasi didalamnya mencakup suatu sistem dan memiliki struktur serta perencanaanya dilakukan dengah penuh kesadaran dan pelaku organisasi didalamnya saling bekerjasama dengan cara terkoordinasi dan kooperatif Salah satu organisasi komunikasi adalah Komunikasi pemerintah.[5]

Dalam kehidupan masyarakat proses komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam usaha membangun desa. Dengan melalui proses komunikasi terjadi pertukaran pesan, ide, gagasan, pengalaman dan maupun informasi mengenai program-program pemerintah sehingga dapat memungkinkan masyarakat untuk mengetahui atau mengakses mengenai informasi tentang rencana, maksud serta tujuan pemerintah dalam usaha untuk membangun desa. [6]

Pemerintah desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan pemerintah gampong dalam wilayah Aceh merupakan unit organisasi pemerintah yang segala urusannya bertemu

---

1 Marhaeni Fajar, *Ilmu Komunikasi Teori & Praktik*, Edisi ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

2 Yusuf Zainal Abidin, *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*, Edisi ke-2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).

3 Rochman Shoviani, *Hambatan komunikasi organisasi (Studi Kasus LPP TVRI Stasiun Bengkulu)*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

4 Muhammad Arni, *Komunikasi Organisasi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

5 R. Wayne Pace, dan Don F. Faules, *Komunikasi Organiasasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

6 Fazil, Muhammad dan Awaluddin Arifin, "Pemanfaatan teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Pemerintah Gampong (Desa) di Wilayah Pesisir Kota Lhokseumawe" *Jurnal Jurnalisme*, 9, no. 1, (April 2019): 1-17.

langsung dengan masyarakat yang memiliki tujuan, kepentingan dan kebutuhannya berhubungan dengan kegiatan melayani kepentingan publik.[7] Desa atau gampong diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, karena itu setiap gampong diharapakan pemerintahannya mampu menjadi desa yang mandiri, bertanggung jawab, efektif, dan terbuka sebagai bentuk usaha meningkatkan dalam melayani kepentinga publik serta mampu mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Komunikasi pemerintah desa didalamnya terdapat juga interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang mejadi hubungan timbal balik pemerintah gampong dengan masyarakat, proses tersebut didasarkan dengan adanya kebutuhan secara konkret. Komunikasi serta penyedian informasi yang akuntabel yang baik dari pemerintah desa kepada masyarakat akan menimbulkan keterbukaan atau transparansi dalam pemerintah desa yang menghasilkan kerja sama dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi secara efisien.

Komunikasi pemerintah gampong dalam pengelolaan dana gampong merupakan bagian dari sebuah sistem sosial yang besar, terdapat komunikasi melalui hubungan pemerintah gampong dengan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan gampong komunikasi merupakan alat untuk mencapai kemajuan dan memiliki peranan penting, bukan hanya sekedar untuk mencapai evisiensi ekonomi dalam pemerintahan akan tetapi merupakan suatu hubungan terbuka yang memiliki maksud tidak tersembunyi serta tidak ditutup-tutupi sehingga informasi yang diterima menjadi jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan.

Gampong Alue Leuhob terdiri dari empat dusun yang memiliki beberapa masalah dalam lingkup pembangunan seperti keadan infrastruktur jalan yang sudah banyak berlubang, jembatan penghubung antar desa yang sering rusak dan sangat lama penanganan perbaikannya, serta masalah-masalah lainnya. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah gagal menanggapi kepentingan kemasyarakatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Kurangnya komunikasi atau berbagai hambatan komunikasi yang muncul antara pemerintah dan masyarakat lingkup desa semakin menambah kesenjangan antara dua pihak tersebut dan karena alasan diatas mengakibatkan masyarakat menduga-duga dengan berbagai prasangka buruk terhadap pemerintah desa dan akhirnya banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis dari masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut pembangunan gampong. Sementara itu pemerintahan gampong tidak terlihat mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan masyarakat atau setidaknya upaya mediasi dengan masyarakat yang merasa tak puas terhadap kinerja pemerintah gampong.

Oleh karena alasan ini peneliti tertarik dan ingin mengakaji lebih dalam tentang komunikasi yang terjadi antara pemerintah gampong dalam mengelola dan menyediakan sebuah informasi dengan masyarakat sebagai penerima informasi sekaligus juga pemenuhan terhadap hak-hak mereka sehingga menjadikan sikap saling terbuka antara pemerintah gampong dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman, serta prasangka, masyarakat kepada pemerintah. Maka dari permasalahan tersebut peneliti

[7] Moh Sofiyanto, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang* (Jakarta: Grafika, 2008).

bermaksud untuk menjadikan tema tersebut menjadi lebih ringan dan kompleks dengan judul "Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Dana Gampong".

2. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian serta cara-cara yang dilalui untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan demi menjawab akar dari permasalahan yang ada dalam penelitian maka penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena dianggap sesuai untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan pengamatan dan fokus analisis terhadap isu-isu sosial. Dengan penjabarannya yang bersifat deskriptif, metode penelitian kualitatif dimaksudkan untuk dapat memberikan pemahaman sedalam mungkin kepada para pembaca.

Informan dari penelitian yang berjudul komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ini merupakan informan yang telah peneliti pilih dalam salah satu metode sampling yaitu purposive sampling. Metode sampling dengan purposive sampling adalah memilih sampel yang secara sengaja ditemui karena kecocokan kriteria yang peneliti butuhkan. Dari populasi yang ada, peneliti hanya memilih informan yang berkriteria sebagai masyarakat desa Alue Leuhob yang paling tahu mengenai pengelolaan dana desa. Jumlah informan yang telah peneliti tentukan berjumlah sebanyak 6 informan dengan rincian 3 informan dari aparatur gampong dan 3 informan masyarakat asli Gampong Alue Leuhob.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Dana Gampong di Gampong Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan, maka didapatlah hasil penelitian mengenai komunikasi pemerintah gampong dalam pengelolaan dana gampong di Gampong Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek. Komunikasi pemerintah gampong adalah kegiatan interaksi yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan. Dalam lingkungan organisasi pemerintahan proses menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah gampong dengan masyarakat menjadi faktor paling penting dalam usaha membangun gampong yang sejahtera dan bertanggung jawab selayaknya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah gampong dengan masyarakat Gampong Alue Leuhob.

Dalam praktik komunikasi eksternal pemerintah gampong menjaga komunikasi dan membangun serta menjaga hubungan social yang baik dengan masyarakat seabagai bentuk usaha melayani kebutuhan masyarakat dalam penggelolaan dana gampong. Hubungan sosial yang dibangun oleh pemerintah gampong dengan masyarakat Alue leuhob dalam pengelolaan dana gampong adalah dengan melibatkan masyarakat dalam rapat musyawarah dan merencanakan serta melaksanakan kegiatan kedesaan dengan anggaran dana gampong.

Pemerintah gampong memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan ide-ide dan gagasan mereka. Ini merupakan upaya pemerintah gampong dalam memenuhi kepentingan masyarakat dengan membuka diri terhadap masukan dan kritik yang diberikan oleh masyarakat. Tindakan ini dilakukan

sebagai langkah evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah gampong.

Penyaluran informasi terkait pengelolaan dana gampong adalah wujud komunikasi yang trasparan dari pihak pemerintah gampong. Penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah gampong dilakukan secara terbuka dan langsung (verbal) yang berarti pesan informasi yang dikemas dan disajikan kepada masyarakat dalam bentuk uacapan Bahasa (oral) seperti pada saat penyampaian tentang rencana penggunaan anggaran dana gampong pada rapat musyawarah pemerintah gampong dengan masyarakat, dan juga komunikasi langsung dengan berbentuk tulisan dan lambang yang digunakan pada plang-plang dan batu prasasti pada wilayah area pembangunan di gampong Alue leuhob.

Komunikasi verbal memainkan peran utama dalam menyampaikan informasi secara langsung dari pemerintah gampong kepada masyarakat.[8] Pertemuan rapat dan musyawarah menjadi platform penting dimana pemerintah gampong dapat menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dana gampong, menjelaskan kebijakan, program, dan memfasilitasi diskusi serta masukan dari mayarakat.[9] Selain itu, sosialilasi juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara langsung antara pemerintah gampong dengan masyarakat.

Hasil dari penerapan teori Fusi Bakke dalam komunikasi pemerintah gampong di Gampong Alue Leuhob adalah meningkatnya keterlibatan masyarakat, partisipasi aktif, dan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan dana gampong. Melalui rapat, sosialisasi, dan penggunaan media informasi, pemerintah gampong dapat menyampaikan informasi dengan lebih efektif, memperoleh umpan balik dari masyarakat, dan membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Keterkaitan antara penelitian mengenai komunikasi pemerintah gampong dalam pengelolaan dana gampong di Gampong Alue Leuhob dan teori Fusi Bakke terletak pada pemahaman tentang pentingnya komunikasi interpersonal, komunikasi lisan, proses penyebaran informasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi oleh masyarakat. Dengan penerapan komunikasi yang efektif dan mempertimbangkan faktor-faktor pengaruh adopsi, pemerintah gampong dapat menciptakan partisipasi aktif masyarakat dan meningkatkan tingkat adopsi inovasi dalam pengelolaan dana gampong.

3.2 Hambatan Komunikasi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Dana Gampong di Gampong Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek

Dalam menjalankan komunikasi antara pemerintah gampong dengan masyarakat mengenai pengelolaan dana gampong, tentu saja terdapat beberapa penghambat yang terjadi. Hambatan–hambatan yang terjadi pada komunikasi organisasi pemerintah Gampong Alue Leuhob, yakni hambatan teknis dan juga hambatan manusiawi yang mempengaruhi kegiatan komunikasinya.

Hambatan teknis adalah hambatan yang terjadi karena alat komunikasi mengalami gangguan atau hambatan, sehingga pesan yang disampaikan melalui saluran tidak dapat

---

[8] Kusumawati, "Komunikasi Verbal dan Nonverbal" *Al-Irsyad: Jurnal pendidikan dan Konseling* 6, no. 2 (2016): 45.

[9] Dwi Fitri, "Kapasitas Lembaga Gampong dalam Pengelolaan Anggaran dan Pelaporan di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara" *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* 2, no.1, (April 2023):77-82.

berjalan dengan lancar.[10] Hambatan teknis yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Alue Leuhob dalam pengelolaan dana gampong yaitu penggunaan teknologi informasi yang kurang memadai seperti kurangnya aksesibilitas terhadap jaringan internet yang tidak stabil dan belum tersedianya sarana dan prasarana untuk komunikasi online seperti website dan media sosial.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan dialog antara pemerintah gampong dengan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi dan pelayanan publik. Namun, karena keterbatasan tersebut mengakibatkan Pertukaran informasi yang seharusnya lebih mudah malah menjadi kurang efektif.

Pada hambatan manusiawi, disebabkan oleh dua pihak yaitu pemerintah gaampong dan masyarakat. Hambatan yang muncul dari pihak pemerintah gampong adalah karena adanya keterbatasan sumberdaya manusia yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola website gampong.

Hambatan manusiawi juga disebabkan oleh masyarakat gampong yakni kurangnya ketertarikan mengenai pengelolaan dana gampong terkait hal-hal yang kurang memberikan bermanfaat bagi sebagian warga, membuat mereka kurang tertarik untuk megikuti rapat. Padahal tugas mengawasi jalannya pengelolaan dana bukan hanya tugas dari aparat gampong saja, namun juga masyarakatnya juga, dengan demikian informasi yang diberikan pemerintah gampong menjadi tidak merata ke semua pihak, sehingga muncul kesalahpahaman dan prasangka antara pemerintah dan masyarakat gampong. Untuk mengatasi hambatan manusiawi ini, diperlukan upaya seperti membangun saluran komunikasi yang terbuka dan transparan, meningkatkan keterampilan komunikasi pemerintah desa dan masyarakat, membangun kepercayaan melalui tindakan nyata, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana gampong.

4. KESIMPULAN

Dalam lingkungan organisasi pemerintahan, proses menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah gampong dengan masyarakat menjadi faktor paling penting dalam usaha membangun gampong yang sejahtera dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk kegiatan komunikasi pada pemerintah gampong adalah pada proses mengkomunikasikan pengelolaan dana gampong.

Komunikasi yang digunakan pemerintah Gampong Alue Leuhob untuk menyebarkan informasi mengenai pengelolaan dana gampong kepada masyarakat adalah komunikasi secara langsung (verbal) dengan menyelenggarakan rapat dan musyawarah terbuka yang tidak hanya dapat dihadiri pemerintah gampong dan masyarakat. Dalam mewujudkan transparansi dalam mengelola dana gampong pemerintah memberikan informasi terkait pengelolaan dana gampong dengan menggunakan bantuan media plang-plang dan batu prasasti, yang berisi informasi penggunaan dana gampong seperti; nama dan tahun kegiatan, jumlah anggaran, dan lain sebagainya.

Kurangnya Sumber daya manusia yang terampil untuk mengelola media komunikasi berbasis website gampong serta terbatasnya sarana dan prasarana gampong seperti alat teknologi untuk mengolah data informasi mengenai dana gampong serta sulitnya

[10] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

aksesibilitas jaringan internet menghabat pemerintah gampong dalam usaha memberikan informasi yang transparan terkait pengelolaan dana gampong. kurangnya ketertarikan masyarakat mengenai pengelolaan dana gampong terkait hal-hal yang kurang memberikan bermanfaat bagi sebagian masyarakat, membuat mereka kurang aktif untuk mengawasi jalannya pengelolaan dana gampong.

DAFTAR PUSTAKA

Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

Dwi Fitri, "Kapasitas Lembaga Gampong dalam Pengelolaan Anggaran dan Pelaporan di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara" *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* 2, no.1, (April 2023):77-82.

Fazil, Muhammad dan Awaluddin Arifin, "Pemanfaatan teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Pemerintah Gampong (Desa) di Wilayah Pesisir Kota Lhokseumawe" *Jurnal Jurnalisme*, 9, no. 1, (April 2019): 1-17.

Kusumawati, "Komunikasi Verbal dan Nonverbal" *Al-Irsyad: Jurnal pendidikan dan Konseling* 6, no. 2 (2016): 45.

Marhaeni Fajar, *Ilmu Komunikasi Teori & Praktik*, Edisi ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

Moh Sofiyanto, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang* (Jakarta: Grafika, 2008).

Muhammad Arni, *Komunikasi Organisasi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

R. Wayne Pace, dan Don F. Faules, *Komunikasi Organiasasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

Rochman Shoviani, *Hambatan komunikasi organisasi (Studi Kasus LPP TVRI Stasiun Bengkulu)*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Yusuf Zainal Abidin, *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*, Edisi ke-2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).